

MAKALAH
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Dr. Pujiati, M.Pd., & Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Nama Kelompok:

Ni Wayan Vara Wulandari	2313031017
Tazki Alfikri	2313031028

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami mengucapkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Selaku dosen pengampu Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Kami selaku penulis telah berupaya menyajikan makalah ini dengan sebaik-sebaiknya, berdasarkan pengetahuan dan beberapa referensi yang kami ambil.

Makalah ini secara khusus membahas mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik, siklus anggaran, serta proses penetapan anggaran. Ketiga topik ini merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada pelayanan publik, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemahaman terhadap anggaran publik menjadi sangat krusial, tidak hanya bagi para pengambil kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang memiliki hak untuk mengakses informasi keuangan negara.

Dengan memahami hubungan ini, diharapkan dapat tercipta sistem perbankan yang lebih efisien, aman, dan terpercaya. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajarannya dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kami menyadari makalah ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf serta terbuka kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

Bandar Lampung, 29 September 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Pembelajaran.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
2.1. Jenis-Jenis Anggaran Yang Digunakan Dalam Sektor Publik.....	3
2.2. Siklus Anggaran Sektor Publik	6
2.3. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	7
BAB III.....	9
PENUTUP.....	9
3.1. Kesimpulan	9
3.2. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
STUDI KASUS	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan alat penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis anggaran, siklus anggaran, dan proses penyusunannya menjadi sangat krusial bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sektor publik memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan anggaran dibandingkan dengan sektor swasta. Misalnya, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan penganggaran.

Untuk itu, penting untuk memahami berbagai jenis anggaran yang diterapkan, seperti anggaran tetap, anggaran fleksibel, anggaran kinerja, hingga anggaran berbasis nol. Masing-masing jenis anggaran memiliki kelebihan dan kekurangan, serta digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi publik. Selain memahami jenis anggaran, pemahaman mengenai siklus anggaran juga tidak kalah penting. Siklus anggaran sektor publik biasanya mencakup tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap tahapan memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siklus ini menjadi indikator bagaimana efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dapat dicapai.

Di sisi lain, proses penyusunan anggaran merupakan aspek teknis dan strategis yang menentukan kualitas dokumen anggaran itu sendiri. Penyusunan anggaran sektor publik umumnya melibatkan berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPR, serta masyarakat. Proses ini menuntut adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan ketersediaan sumber daya keuangan, serta kemampuan untuk menyusun prioritas dengan tepat.

Dengan mempertimbangkan pentingnya topik ini, makalah ini akan membahas secara mendalam mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik, siklus anggaran, serta proses penyusunan anggaran, guna memberikan pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis anggaran yang digunakan dalam sektor publik?
2. Bagaimana siklus anggaran sektor publik?
3. Bagaimana proses penyusunan anggaran sektor publik?

1.3. Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui jenis-jenis anggaran yang digunakan sektor publik
2. Untuk mengetahui siklus anggaran sektor publik
3. Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran sektor publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Jenis-Jenis Anggaran Yang Digunakan Dalam Sektor Publik

Menurut Mardiasmo(2018) ada dua jenis anggaran sektor publik diantaranya:

a) Anggaran Operasional (*Operational/Recurrent Budget*)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin”. Belanja rutin (*Recurrent expenditure*) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.

b) Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintahan dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pada dasarnya, pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui proses pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat tersebut dalam bentuk kebijakan publik dan program yang memberi manfaat bagi pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Adanya keterbatasan sumber daya, menyebabkan anggaran mempunyai *trade-off*, sebagian uang tidak dapat

dialokasikan untuk suatu bidang tanpa mengurangi jumlah alokasi pada bidang yang lain, atau adanya penambahan jumlah pajak yang dibayar ke publik. Pemerintah tidak mungkin memenuhi permintaan seluruh *stakeholder* secara simultan. Pemerintah memutuskan bidang mana yang akan didahulukan atau diprioritaskan. Anggaran berfungsi sebagai alat politis yang digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

Menurut Halim(2007) ada lima jenis anggaran sektor publik diantaranya:

a) *Line Item budgeting*

Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Merupakan pendekatan paling tua dan banyak mengandung kelemahan antara lain: berorientasi kepada input, dasar lokasi tidak jelas, tidak fleksibel dan berorientasi jangka pendek.

Konsep ini akhirnya ditinggalkan dan digantikan oleh konsep-konsep yang muncul kemudian seperti anggaran program (*program budgeting*), sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran (*planing, programming budgeting system*) dan penganggaran dasar nol (*Zero based Budgeting*).

b) *Incremental Budgeting*

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka dipos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya.

c) *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

Planning Programming Budgeting System (PPBS) merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu system sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah.

Dalam PPBS terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang diperlukan dan pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. PPBS berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program dan sub-sub program serta berbagai proyek.

d) *Zero Bases Budgeting (ZBB)*

Zero Bases Budgeting (ZBB) adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan/pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu.

Namun semua konsep-konsep tersebut diatas, selain menawarkan kekuatannya juga akhirnya tenggelam oleh berbagai kelemahannya. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan manajemen publik baru, yang berorientasi kepada hasil, pelayanan, inovasi, fleksibilitas dan akuntabilitas. Maka banyak negara mulai beralih ke penganggaran kinerja (*performance budgeting*).

e) *Performance Budgeting (Penganggaran Kinerja)*

Performance Budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*Workload*) dan unit *cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Anggaran kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil kerja

2.2. Siklus Anggaran Sektor Publik

Menurut Handayani(2019) Siklus anggaran terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a) **Penetapan Prosedur dan Tim Penganggaran Tahun Terkait**

Tahapan pertama dari siklus anggaran adalah penerapan prosedur atau aturan dalam pembuatan anggaran sekaligus penetapan tim penganggaran terkait. Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.

b) **Penetapan Dokumen Standar Harga**

Dokumen Standar Harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).

c) **Penyebaran dan Pengisian Formulir Rencana Kerja dan Anggaran**

Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

d) **Rekapitulasi Kertas Kerja**

Tahapan selanjutnya proses pembuatan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

e) **Pembahasan Perubahan dan Penyelesaian Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Setelah melakukan tahap rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan

rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja.

f) **Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan menjadi anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran.

2.3. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Proses penyusunan anggaran sektor publik perlu dilakukan dalam upaya pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Selain itu proses penyusunan anggaran juga diharapkan dapat membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, serta meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau MPR dan masyarakat. Menurut Bahrullah(2013) tahapan proses penyusunan anggaran sektor publik sebagai berikut:

a) **Tahap Persiapan Anggaran**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan dengan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Pada tahap ini bagian anggaran menyiapkan format selanjutnya masing-masing unit mengajukan anggaran yang akan dikonsolidasikan untuk semua oleh bagian anggaran.

b) Tahap Ratifikasi/Persetujuan Legislatif

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Presiden dituntut tidak hanya memiliki Managerial Skill namun juga harus mempunyai political skill, salesman dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c) Tahap Implementasi/Pelaksanaan Anggaran

Setelah anggaran disahkan oleh legislatif, pelaksanaan anggaran dimulai baik pengumpulan pendapatan yang diestimasi ataupun pelaksanaan belanja yang telah diappropriasi. Bersamaan dengan pelaksanaan ini adalah dilakukan proses administrasi anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

d) Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemukan banyaknya masalah.

e) Tahap Pemeriksaan

Laporan atas pelaksanaan anggaran selanjutnya diperiksa oleh badan pemeriksa ekstern dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan periode berikutnya dan jika ada indikasi penyelewengan korupsi maka akan diteruskan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atau Kepolisian.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dengan memahami jenis-jenis anggaran, siklus anggaran, dan proses penyusunan anggaran dalam sektor publik, kita dapat melihat bahwa pengelolaan anggaran tidak sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan juga bagian dari strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap tahapan dalam penganggaran memiliki peran penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan dana publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas lembaga publik dalam menyusun dan mengelola anggaran menjadi hal yang sangat krusial demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

3.2. Saran

Dalam makalah yang kami tulis, kami sadar bahwa masih banyak ketidaksempurnaan dalam makalah ini, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan oleh semua pihak yang berkecimpung dalam bidang akademik. Demikian pula penyempurnaan dari segala aspek perlu dilakukan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua khususnya para pembaca yang sedang dalam pembelajaran dan sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Hal: 82-83.

Bahrullah, A. 2013. Akuntansi Sektor Publik & Teori. Jakarta: CV. Bumi Metro Raya. Hal: 82-83.

Handayani, M. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Poliban Press. Hal: 46-47.

Halim, A. (2007) Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Hal: 60-61.

STUDI KASUS

Pemerintah Kota Bandar Lampung menghadapi dilema dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Di satu sisi, anggaran operasional harus mencukupi kebutuhan rutin, seperti pembayaran gaji pegawai negeri, biaya pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan publik dasar. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berencana mengalokasikan anggaran modal yang cukup besar untuk pembangunan rumah sakit baru, jalan raya, serta sarana pendidikan.

Namun, keterbatasan sumber daya keuangan menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu memenuhi semua kebutuhan sekaligus. Jika alokasi lebih banyak diberikan pada belanja operasional, maka pembangunan jangka panjang bisa tertunda. Sebaliknya, jika anggaran modal diprioritaskan, maka pelayanan rutin berpotensi terganggu. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Bandar Lampung mencoba mengombinasikan pendekatan incremental budgeting dengan performance budgeting, agar setiap program tidak hanya berorientasi pada input, tetapi juga memperhatikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan perdebatan di DPRD dan masyarakat terkait prioritas anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama agar penggunaan dana publik benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat.

1. Menurut Anda, bagaimana seharusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung menyeimbangkan antara anggaran operasional dan anggaran modal agar kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang dapat terpenuhi?
2. Bagaimana penerapan performance budgeting dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kasus penyusunan APBD Kota Bandar Lampung tersebut?